

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur, Bupati, Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diharapkan dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Tahap penganggaran sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang disusun.

Pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proses pelaksanaan anggaran tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu proses penyusunan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, proses pembayaran dan proses pertanggungjawaban. Setiap pelaksanaan proses kegiatan harus diawasi agar sesuai dengan rencana, pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Suatu pemerintahan sebaiknya mempunyai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik dan jelas karena apabila pemerintahan tersebut tidak memiliki proses penyusunan APBD yang baik akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan di dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan maka harus dilakukan pemisahan tugas antar pihak yang terkait seperti OPD, PPTK, TAPD, Kepala Daerah, DPRD dan Mendagri agar menghindari persekongkolan, untuk menghindari jumlah pengeluaran yang dibesarkan dan tanpa adanya proses penyusunan APBD yang baik dapat menyebabkan kecurangan yang sebenarnya ingin dihindari. Dengan demikian, pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan. Selain itu, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik juga dapat menyediakan data-data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu : Bagaimanakah proses penyusunan anggaran pada Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan Uraian diatas, adapun dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut

- a. Mengetahui dan memahami mekanisme penganggaran pada Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna menyelesaikan studi Program Diploma III Jurusan Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.4 Manfaat Magang

- a. Menambah pengetahuan penulis, terutama tentang mekanisme penganggaran pada Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- b. Dapat memahami baik secara teori maupun praktek serta realisasinya di lapangan
- c. Bagi penulis sendiri kegiatan magang dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh.
- d. Dapat melihat perbedaan dunia perkuliahan dengan dunia kerja.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Adapun tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek/Magang ini adalah Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab saling berhubungan satu sama lainnya. Sistematika penulisan magang ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, rencana kegiatan magang, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dan tentunya memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan laporan magang.

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisi gambaran umum satuan kerja pada kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN



Pada bab ini berisikan tentang hasil yang telah penulis dapatkan selama mengikuti proses magang atau berupa laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berhubungan dengan penyusunan anggaran.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang dilakukan penulis.

